

Mantan Puteri Indonesia dan Suaminya Dituduh Lakukan Penipuan Rp167 Miliar

JAKARTA (IM) - Mantan Puteri Indonesia Persahabatan 2002 berinisial FLC dan suaminya yang merupakan Warga Negara (WN) Italia, dilaporkan ke Polisi. Pasangan suami istri ini dilaporkan Luca Simioni dan Timothee Frederic Walter - keduanya WN Swiss - dengan tuduhan penipuan modus investasi apartemen The Double View Mansion (DVM), hingga Rp167 miliar.

“Dua klien kami ini merupakan korban dari terlapor dalam urusan penjualan unit-unit apartemen DVM dan kepemilikan unit-unit hunian di Apartemen DVM,” ujar kuasa hukum korban, Erdia Christina dalam keterangannya, Jumat (17/11).

Adapun, FLC merupakan pengelola apartemen DVM tersebut. Selain laporan yang dibuat 2 WN Swiss, terlapor FLC juga sempat dilaporkan empat WNA lainnya. Mereka, yakni Emmanuel Valloto WN Swiss, Andrea Colussi Serravallo WN Italia, Carlo Karol Bonati WN Italia dan Barry Pullen WN Inggris.

Laporan yang dibuat yakni menyangkut dugaan penggelapan dana investasi dan pengelolaan hunian sebanyak 15 unit apartemen DVM.

Erdia menjelaskan, laporan ini bermula saat FLC dan

VT, suaminya, menawarkan adanya proyek pembangunan apartemen DVM beserta fasilitas-fasilitasnya pada tahun 2016 kepada kliennya.

“Ketiga investor atau klien kami sepakat untuk berinvestasi dalam membangun dan mengelola apartemen DVM dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama,” paparnya.

Kendati demikian, VT tidak pernah menyetorkan uangnya. Bahkan, karena dia yang berada di Indonesia dan menawarkan proyek DVM, maka para pihak sepakat untuk memberikan dia saham.

Setelah uang investasi terkumpul dan proyek mulai berjalan, kemudian FLC yang merupakan istri VT membuat perusahaan dengan pemegang saham 95 persen namun sama saja, tidak ada setoran uang dalam proyek DVM tersebut.

“Bukan sebagai salah satu pihak investor pembangunan apartemen DVM, namun namanya hanya digunakan mengelola apartemen DVM atas permintaan dan/atau rekomendasi dari suaminya,” katanya.

Akibat aksi penipuan tersebut, kedua WN Swiss mengalami kerugian mencapai Rp167 miliar. Kedua korban melaporkan kasus penipuan itu ke Polda Bali.

• lus

Terima Penghargaan PBB, Briptu Renita Ucapkan Terima Kasih kepada Kapolri

JAKARTA (IM) - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan penghargaan kepada Briptu Renita Rismayanti sebagai polwan terbaik dalam ajang Pekan Polisi PBB tahunan di Markas Besar PBB New York.

Petugas Database Kejahatan dengan Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA), mengaku sangat beruntung dapat menggunakan keterampilan teknologinya untuk meningkatkan keamanan bagi orang-orang di seluruh Republik Afrika Tengah.

“Saya berharap visibilitas yang datang dari memenangkan penghargaan ini akan memperkuat di antara perempuan dan anak perempuan bahwa semua bidang keahlian dalam kepolisian terbuka untuk kita,” kata Briptu Renita, dikutip, Jumat (17/11).

Briptu Renita berharap, penghargaan ini bisa menjadikan motivasi bagi dirinya untuk terus mengembangkan diri lebih baik lagi untuk memajukan Polri.

Selain itu, ia berharap penghargaan tang diraihinya bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan Polri lainnya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Award ini tidak akan tercapai tanpa dukungan Kepala Kepolisian RI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah mendukung saya dalam misi PBB ini,” ujarnya.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadiv Hubinter Polri atas seluruh dukungan dan bimbingan kepada saya,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Briptu Renita bertugas membantu membuat konsep dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan Polisi PBB untuk memetakan serta menganalisis titik rawan kejahatan.

Briptu Renita juga membantu pasukan keamanan negara untuk merencanakan operasi mereka dengan lebih baik dalam mendukung penduduk setempat. • lus

Bus Brimob Polda Lampung Tabrakan dengan Truk Elpiji, 6 Orang Terluka

LAMPUNG TIMUR (IM) - Bus Brimob Polda Lampung tabrakan dengan truk bermuatan gas LPG di wilayah Lampung Timur, Lampung.

Sebanyak enam orang terluka akibat insiden yang terjadi di Jalan Umum, Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur pada Kamis (16/11) pukul 16.06 WIB tersebut.

Berdasarkan rekaman video yang beredar, kondisi kedua kendaraan tersebut tampak ringsek pada bagian depan. Selain dua kendaraan ini, satu sepeda motor ikut terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Sopir truk bermuatan gas LPG sempat terjepit di bagian mobil yang ringsek. Setelah berhasil dievakuasi korban dibawa ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, membenarkan terkait peristiwa kecelakaan tersebut.

“Benar, sore kemarin terjadi kecelakaan tersebut yang melibatkan tiga kendaraan,” ujarnya, Jumat (17/11).

Menurut Umi, peristiwa tersebut terjadi beberapa waktu sebelum kecelakaan tersebut.

bus Brimob hilang kendali karena jalanan yang licin akibat hujan deras.

Bus Brimob berjalan dari arah Pekalongan menuju Sukadana beriringan dengan mobil Brimob berjenis PJJ dan Truk Bekum Brimob, dengan posisi Bus Brimob berada paling belakang.

Setibanya di lokasi kejadian, akibat jalan licin karena sedang hujan deras, bus Brimob mengalami oleng dan berjalan ke kanan jalan. Kemudian dari arah belakang yaitu arah Sukadana menuju Metro datang truk gas LPG bernomor polisi BE 8167 AUA.

“Karena jarak yang sudah dekat Bus Brimob tidak dapat menghindar dan terjadi kecelakaan tersebut, sementara usai kedua kendaraan bertabrakan ada satu motor yang menabrak bagian belakang bus,” kata Umi.

Ia mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, 6 orang mengalami luka-luka.

“Ada 6 baik dari Brimob ataupun dari truk LPG. Saat ini mereka sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan,” tuturnya. • lus

FOTO: ANT



RAPAT KOORDINASI

SUPERVISI KPK DAN POLRI

Direktur II Koordinasi Supervisi KPK Brigjen Pol. Yudiawan Wibisono (tengah) bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak (kiri) dan Wadir Tipikor Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Arief Adiharsa (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan rapat koordinasi penanganan perkara kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/11). Rapat koordinasi supervisi KPK dan Polri terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Bareskrim Mulai Usut Kebocoran Rapat MK soal Putusan Terkait Usia Capres-Cawapres

MKMK menyebut terjadi kebocoran informasi rapat permusyawaratan hakim (RPH) MK beberapa hari sebelum perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus.

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mulai menyelidiki dugaan adanya kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan syarat batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Bareskrim mendalami

Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Jumat (17/11).

Penyidik Bareskrim Polri sudah mulai memeriksa lima saksi. Namun, belum dijelaskan siapa saja saksi yang dimaksud.

“Saat ini kami sudah mengklarifikasi lima orang saksi dan kami sedang mempelajari perkara ini lebih lanjut,” ujar Djuhandhani Rahardjo Puro.

Dihubungi terpisah, Maydika Ramadani selaku pelapor dari P3K mengatakan, dugaan kebocoran itu diperolehnya dari sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi (MKMK) soal pelanggaran etik hakim. Di bagian kesimpulan, menurut Maydika, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyebut soal adanya kebocoran informasi RPH kepada salah satu media massa.

Pembocoran hasil RPH MK itu termasuk dalam kategori pelanggaran berat, Sebab, Maydika menilai bahwa RPH merupakan rahasia negara.

“Karena telah menyebabkan kegaduhan dan permasalahan nasional, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi,” ujar Maydika dalam keterangan tertulis.

Dalam laporannya, Maydika melaporkan soal Pasal 112 KUHP tentang dugaan penyebaran informasi yang seharusnya dirahasiakan untuk kepentingan negara. Namun, ia tidak menyebutkan siapa yang dilaporkannya.

Dalam laporan, Maydika hanya melaporkan soal kasusnya dengan harapan pihak Kepolisian dapat menyelidik pelaku kebocorannya.

“Diperlukan adanya tindakan dari aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, MKMK memutuskan bahwa sembilan hakim konstitusi

terbukti melanggar kode etik berupa prinsip kepastian dan kesopanan dalam penanganan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama prinsip kepastian dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat.

“Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor,” ujar Jimly lagi.

MKMK menyatakan, telah terjadi kebocoran rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Kebocoran rahasia ini berpijak dari reportase Majalah Tempo edisi 22 Oktober 2023 bertajuk “Skandal Mahkamah Keluarga”, beberapa hari sebelum perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus.

Artikel tersebut mengurai secara rinci peristiwa yang terjadi dalam RPH. Menurut Majalah Tempo, informasi diperoleh dari dua narasumber, salah satunya petinggi MK. Akan tetapi, dari hasil penelusuran MKMK, seluruh hakim konstitusi mengaku tak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH. • lus

Polda Metro Sita LHKPN Ketua KPK Firli Bahuri untuk Menentukan Tersangka Pemerasan SYL

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya menyita dokumen laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) milik Ketua KPK, Firli Bahuri. Hal ini untuk menentukan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyitaan LHKPN milik Firli juga untuk mengumpulkan bukti.

“Semua yang dilakukan, penyitaan (LHKPN) oleh penyidik dalam rangka untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi,” kata Ade di Mapolda Metro Jaya, Jumat (17/11).

“Itu dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya,” katanya.

Dokumen tersebut disita dalam pemeriksaan kedua Firli yang digelar di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11). Beberapa surat maupun dokumen itu disita terkait dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini ditangani penyidik gabungan.

“Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap

LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam periode 2019, 2020, 2021, hingga 2022,” ujar Ade di Gedung Bareskrim Mabes Polri.

Untuk diketahui, status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam menangani kasus ini, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton.

Firli sendiri mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dia turut membantah tuduhan pemerasan dan penerimaan uang miliaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo.

Tak Ada Supervisi

Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan rapat koordinasi bersama KPK terkait penyelidikan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan lembaga antirasuah tersebut terhadap SYL, Jumat (17/11). Kombes Pol Ade mengatakan, dari hasil pertemuan itu tidak ada supervisi bersama KPK terkait penyelidikan atas perkara yang ada.

“Jadi dalam rapat tersebut

diputuskan untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan tidak sampai ke langkah supervisi,” katanya.

Fungsi koordinasi akan dimaksimalkan bersama Deputi Korsup KPK untuk keperluan pertukaran informasi.

Sebagaimana informasi, Polda Metro Jaya, sebelumnya mengirimkan surat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terkait penugasan supervisi penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke KPK pada Jumat (11/10) lalu.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan surat tersebut berisikan permohonan kepada pimpinan KPK untuk mengagaskan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi atau Korsub dalam penanganan kasus yang sudah masuk ke tahap penyidikan.

“Ini sebagai bentuk transparansi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini kami tangani,” paparnya.

Sebelumnya Ketua KPK, Firli Bahuri, diperiksa polisi di Bareskrim Polri, pada Kamis (16/11). Ia diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap SYL. • lus



KECELAKAAN PESAWAT SUPER TUCANO

Warga berada di dekat bangkai pesawat tempur taktis EMB-314 Super Tucano TNI AU yang mengalami kecelakaan di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (17/11). Dua pesawat tempur taktis EMB-314 Super Tucano TNI AU milik Skadron Udara 21 Landasan Udara Abdulrachman Saleh, Malang mengalami kecelakaan di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 16 November 2023 yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia.

Polisi Kejar Tiga Mahasiswa ITB, Diduga Jadi Joki CPNS di Lampung

BANDAR LAMPUNG (IM) - Polisi masih memburu tiga pelaku lain yang terlibat perijokan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan 202. Sebelumnya, seorang pelaku tertangkap tangan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Para pelaku diduga kuat melancarkan aksi berkelompok alias sindikat.

Terduga pelaku berinisial RDS (20) sebelumnya berhasil diamankan Tim PAM SDO Inteljen Kejati Lampung saat tes SKD berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka, Kota Bandar Lampung saat ini telah diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Lampung.

“Mereka adalah tim sebetulnya. Namun demikian ketika (kasus) ini mencuat, tiga (terduga pelaku) lainnya melarikan diri,” ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, Jumat (17/11/2023).

Umi mengatakan, Polda Lampung telah mengidentifikasi ketiga pelaku yang melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Disinggung soal peran masing-masing pelaku, Umi menyebut, terduga pelaku RDS bertindak sebagai eksekutor alias penjoki, se-

dangkan ketiga rekan lainnya berperan memuluskan dan membantu aksi RDS

“Ketiga orang terduga menjadi tim dari RDS. Ketiga orang tim dari RDS ini untuk memuluskan kegiatan joki. Jadi yang joki hanya RDS,” jelas Umi.

Lebih lanjut Umi mengungkapkan, keempat terduga pelaku sindikat joki ini merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) alias berasal dari satu universitas sama dengan RDS. “Iya, mereka semuanya sama-sama dengan RDS (mahasiswa ITB),” ucap Umi.

Selanjutnya Umi berharap agar pihak kampus mendukung upaya pengungkapan kasus joki CPNS yang telah melibatkan mahasiswa tersebut, sekaligus mengimbau para terduga pelaku kooperatif.

“Ya, kami minta pihak-pihak terlibat bisa menyerahkan diri,” tutur dia.

Sementara terkait upah yang diterima terduga pelaku RDS dan rekan-rekannya, Umi belum dapat membeberkan hal tersebut lantaran masih menjadi materi pendalaman pihak penyidik.

“Untuk hal tersebut masih dalam pendalaman (soal upah). Pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka, masih menjadi saksi,” pungkas mantan Kapolres di Polda Metro Jaya. • lus